



Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Keterlibatan Petani Lokal serta UMKM dalam Rantai Pasok di Kecamatan Sompak

Agusandi^{1*}, Stella Melin², Lusya Sedati³

¹⁻³ Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: agusandiegok89@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meals (MBG) Program in Sompak District, focusing on distribution, affordability, and perceived benefits to the community. The MBG Program is a government policy to improve the nutritional status of vulnerable groups, such as students, pregnant women, breastfeeding mothers, toddlers, and low-income communities. The study used a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies involving the sub-district, program implementers, and local business actors. Data analysis was conducted descriptively. The results show that the implementation of MBG in Sompak District is still in its early stages, resulting in sub-optimal service coverage and insufficient distribution of nutritious food to reach all areas evenly. Nevertheless, this program has provided benefits in the form of increased public awareness of the importance of balanced nutrition and helped meet the food needs of beneficiaries. The main obstacles include limited budget, infrastructure, and coordination between implementers. Therefore, strengthening distribution, expanding services, and improving coordination are needed to support the sustainability of the program.*

Keywords: *Balanced Nutrition; Community Nutrition; Food Distribution; MBG Program; Policy Implementation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak dengan fokus pada distribusi, keterjangkauan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Program MBG merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status gizi kelompok rentan, seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pihak kecamatan, pelaksana program, serta pelaku usaha lokal. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG di Kecamatan Sompak masih berada pada tahap awal sehingga cakupan layanan belum optimal dan distribusi makanan bergizi belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Meskipun demikian, program ini telah memberikan manfaat berupa meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan membantu pemenuhan kebutuhan pangan penerima manfaat. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan koordinasi antar-pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan distribusi, perluasan layanan, dan peningkatan koordinasi untuk mendukung keberlanjutan program.

Kata kunci: Distribusi Pangan; Implementasi Kebijakan; MBG Program; Nutrisi Masyarakat; Nutrisi Seimbang.

1. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain berorientasi pada aspek kesehatan, program ini juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku ekonomi lokal seperti petani, peternak, dan UMKM dalam rantai pasok pangan.

Secara regulasi, implementasi Program MBG didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang menegaskan pembentukan lembaga pelaksana kebijakan pemenuhan gizi nasional. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 115

Tahun 2025 Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan MBG wajib memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes dalam rantai pasok dan logistik program. Ketentuan ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Program MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. (Sari. 2026) menyatakan bahwa program MBG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan UMKM. Selain itu, (Silaban. 2026) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi MBG sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi sebagaimana dalam teori Grindle, yang menekankan pentingnya aktor pelaksana dan kondisi lingkungan kebijakan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana keterlibatan petani lokal dan UMKM dalam rantai pasok di tingkat kecamatan, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Sompak. Padahal, Kecamatan Sompak memiliki potensi wilayah yang cukup besar dengan karakteristik sebagai daerah pedesaan yang tersebar dalam 7 desa dan 34 dusun dengan luas wilayah 219,76 Ha (BPS Kabupaten Landak, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur wilayah Sompak sangat relevan untuk pelaksanaan program berbasis masyarakat seperti MBG.

Dari aspek sosial dan pelayanan dasar, Kecamatan Sompak memiliki sarana pendidikan yang cukup tersebar di seluruh wilayahnya. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat 20 satuan pendidikan yang terdiri atas 15 Sekolah Dasar (SD), 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di tujuh desa di Kecamatan Sompak. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan ini menjadi indikator penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak dan remaja usia sekolah.

Selain sektor pendidikan, pelayanan kesehatan dasar juga telah tersedia melalui jaringan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar di seluruh desa. Tercatat terdapat 26 Posyandu yang melayani masyarakat di Desa Pakumbang, Sabadak, Galar, Lingkonong, Amawakng, Tapakng, dan Pauh. Posyandu berperan penting dalam pemantauan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta pencegahan dan penanganan masalah gizi di tingkat masyarakat.

Keberadaan sekolah dan Posyandu tersebut menunjukkan bahwa kelompok sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak sangat luas dan beragam. Sasaran program tidak hanya mencakup peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Dengan demikian, sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program gizi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Sompak (Jadwal Posyandu Puskesmas Kecamatan Sompak bulan Juni 2026).

Kecamatan Sompak memiliki potensi sosial dan ekonomi lokal yang cukup besar, keterlibatan petani lokal, pelaku UMKM, dan pelaku usaha setempat dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, serta usaha mikro yang berkembang di wilayah ini seharusnya dapat menjadi sumber utama penyediaan bahan pangan untuk mendukung keberlangsungan program. Pelibatan pelaku ekonomi lokal tidak hanya bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang segar dan berkualitas, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Penting untuk menelaah sejauh mana implementasi Program MBG telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan pemerintah yang menekankan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (Ginting 2020). Keterlibatan petani dan UMKM dalam program ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan. Apabila pelaku usaha lokal dilibatkan secara optimal, maka manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat dalam proses produksi, pengolahan, dan distribusi bahan pangan. Dengan demikian, Program MBG dapat berfungsi sebagai instrumen peningkatan gizi sekaligus sebagai penggerak ekonomi lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada sejauh mana program mampu menjangkau dan memberikan manfaat kepada masyarakat penerima, tetapi juga mengkaji keterlibatan petani lokal, pelaku UMKM, dan pelaku usaha setempat dalam rantai pasok program (Yuwono and Mirnawati 2021). Melalui kajian ini, dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan realitas pelaksanaan di lapangan, serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak dalam menjangkau serta memberikan manfaat kepada masyarakat penerima program? Kedua, bagaimana keterlibatan petani lokal, pelaku UMKM, dan pelaku usaha setempat dalam rantai pasok serta pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Sompak? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Program MBG dalam menjangkau dan memberikan manfaat kepada masyarakat penerima, serta mengkaji tingkat keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam mendukung rantai pasok dan pelaksanaan program. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan perbaikan implementasi Program MBG agar lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kecamatan Sompak.

2. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus yang bertujuan memahami proses implementasi MBG melalui SPPG di Kecamatan Sompak. Pendekatan ini digunakan karena mampu menggali makna, proses serta dinamika sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program di lapangan.

Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak.

Sumber Data

Data primer melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi lapangan serta data sekunder diperoleh dari laporan, media online dan literatur.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian menggunakan purposive sampling yaitu pengelola SPPG di Desa Galar, tokoh masyarakat Kecamatan Sompak dan pelaku usaha (petani, UMKM dan pemasok bahan pangan), Guru dan masyarakat penerima manfaat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara via chat/telpon WhatsApp dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Menggunakan metode Miles, Huberman meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak dalam menjangkau dan memberikan manfaat kepada masyarakat penerima program?

Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Sompak.

Nama	: Tokoh Masyarakat
Alamat	: Kecamatan Sompak
Pertanyaan:	
1. Berapa jumlah SPPG yang sudah beroperasi di Kecamatan Sompak?	Baru 1 SPPG yang beroperasi di Desa Galar.
2. Berapa jumlah tenaga kerja yang ada di SPPG Kecamatan Sompak?	Sebanyak 44 pekerja yang berada di SPPG Desa Galar.
3. Berapa jumlah Posyandu dan Sekolah yang sudah menerima MBG?	Terdapat 14 sekolah dan 3 posyandu yang sudah menerima MBG.
4. Berapa jumlah Posyandu dan Sekolah yang belum menerima MBG?	Terdapat 20 sekolah dan 23 posyandu yang belum menerima MBG.

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah 2026.

Tabel 1 hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sompak, diperoleh informasi bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Saat ini, hanya terdapat 1 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, yaitu di Desa Galar. SPPG tersebut menjadi pusat utama pelaksanaan program MBG di wilayah Kecamatan Sompak.

Dari sisi sumber daya manusia, SPPG yang berada di Desa Galar telah mempekerjakan sebanyak 44 tenaga kerja yang terlibat dalam proses operasional, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.

Terkait cakupan penerima program, diketahui bahwa sebanyak 14 sekolah dan 3 posyandu telah menerima manfaat Program MBG. Sementara itu, masih terdapat 20 sekolah dan 23 posyandu yang belum mendapatkan layanan program tersebut di Kecamatan Sompak. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi program masih belum merata di seluruh wilayah kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak masih belum optimal dari segi pemerataan distribusi dan cakupan layanan. Meskipun program telah mulai berjalan melalui 1 SPPG di Desa Galar dengan dukungan 44 tenaga kerja, namun cakupan penerima manfaat masih terbatas.

Ketimpangan distribusi ini terlihat dari masih banyaknya satuan pendidikan dan posyandu yang belum menerima manfaat program, yaitu 20 sekolah dan 23 posyandu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan MBG dengan realisasi di

lapangan. Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 38 ayat (1), pelaksanaan MBG seharusnya menjangkau seluruh kelompok sasaran secara bertahap dengan tetap mengedepankan pemerataan dan keterlibatan pelaku ekonomi lokal (Aulia, Dewi, and Furnamasari 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak masih berada pada tahap awal sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Program ini baru dilaksanakan melalui satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Desa Galar dengan dukungan 44 tenaga kerja. Kehadiran SPPG tersebut menunjukkan adanya upaya awal pemerintah dalam merealisasikan program peningkatan gizi masyarakat, namun kapasitas layanan yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Sompak (Astawa and Tegeh 2019).

Dari aspek cakupan layanan, penerima manfaat Program MBG masih relatif terbatas. Hingga saat penelitian dilakukan, program baru menjangkau 14 sekolah dan 3 posyandu, sementara masih terdapat 20 sekolah dan 23 posyandu yang belum memperoleh layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi program belum merata dan masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap manfaat program. Akibatnya, tujuan utama MBG untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, belum dapat diwujudkan secara menyeluruh di Kecamatan Sompak.

Dari aspek pemberdayaan ekonomi lokal, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan petani lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok Program MBG masih belum optimal (Christiani and Masalah 2023). Bahan pangan yang digunakan oleh SPPG sebagian besar belum berasal langsung dari petani setempat, termasuk dari wilayah yang memiliki potensi produksi sayuran dan komoditas pangan lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa belum tersedia mekanisme yang efektif untuk menghubungkan kebutuhan program dengan kapasitas produksi masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan antara pemerintah, pengelola program, petani, serta pelaku UMKM agar Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan (Kharisma 2020).

Selain itu, belum meratanya penerima manfaat juga berimplikasi pada terbatasnya dampak ekonomi program terhadap masyarakat lokal (Batara 2012). Seharusnya, dengan

adanya MBG, petani lokal dan UMKM di Kecamatan Sompak dapat terlibat dalam penyediaan bahan pangan, sehingga tercipta efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian desa. Namun, dengan cakupan yang masih terbatas, peluang keterlibatan ekonomi lokal juga belum maksimal. Dengan demikian, diperlukan perluasan jumlah SPPG, peningkatan koordinasi antar desa, serta penguatan sistem rantai pasok berbasis lokal agar implementasi Program MBG di Kecamatan Sompak dapat berjalan lebih merata, efektif, dan sesuai dengan tujuan kebijakan nasional (Novia, Saiful, and Utomo 2021).

Bagaimana keterlibatan petani lokal, pelaku UMKM, dan pelaku usaha setempat dalam rantai pasok dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak?

Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Penampung Sayur Lokal.

Nama	: Suriadi Handika Batuah
Umur	: 25 Tahun
Pekerjaan	: Penampung Sayur Lokal
Alamat	: Pojok, Dusun Pojan, Desa Tapakng
Lama Usaha	: 7 Tahun
Pertanyaan:	
1. Apakah bahan baku yang digunakan SPPG diperoleh langsung dari petani lokal atau melalui pemasok/perantara?	Yang saya ketahui SPPG tidak ada membeli bahan baku ke petani lokal khususnya di Pojok yang merupakan penghasil sayur di Kecamatan Sompak.
2. Bagaimana memastikan bahan yang dibeli benar berasal dari petani lokal?	Sangat mudah untuk diketahui, tapi sampai saat ini pembelian sayur tidak ada ke petani lokal khususnya di Pojok yang merupakan penghasil sayur di Kecamatan Sompak.

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah 2026.

Tabel 2 berdasarkan hasil wawancara dengan Suriadi Handika Batuah (25 tahun), pelaku usaha di Dusun Pojan, Desa Tapakng, diperoleh informasi bahwa bahan baku yang digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak bersumber langsung dari petani lokal, khususnya dari wilayah Pojok yang dikenal sebagai salah satu sentral produksi sayuran di Kecamatan Sompak. Informan menyatakan bahwa meskipun daerah tersebut memiliki potensi pertanian yang cukup baik, hingga saat ini belum terdapat pembelian hasil pertanian secara langsung oleh pihak SPPG dari petani setempat (Dominggus and Pius Pandor 2022). Selain itu, informan menjelaskan bahwa secara teknis sangat mudah untuk mengidentifikasi asal bahan baku yang digunakan, termasuk apakah berasal dari petani lokal atau tidak. Namun dalam praktiknya, belum terlihat adanya mekanisme pembelian yang melibatkan petani lokal sebagai pemasok utama dalam penyediaan bahan pangan untuk program SPPG di wilayah tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi pelibatan petani lokal dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG di Kecamatan Sompak belum berjalan optimal. Kondisi ini bertentangan dengan arah kebijakan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 38 ayat (1) yang menegaskan bahwa penyelenggaraan MBG harus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan UMKM, petani, peternak, dan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok. Tidak optimalnya keterlibatan petani lokal, khususnya di wilayah Pojok yang memiliki potensi sebagai sentra sayuran, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan (*policy design*) dan implementasi di lapangan (*policy implementation*) (Aulia, Dewi, and Furnamasari 2021). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian implementasi kebijakan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh koordinasi aktor pelaksana dan mekanisme distribusi yang efektif. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya efek pengganda (*multiplier effect*) program MBG terhadap ekonomi lokal. Seharusnya, keberadaan SPPG dapat menjadi pasar baru bagi petani lokal, namun dalam praktiknya manfaat ekonomi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar (Cahyo 2017). Dengan demikian, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme pengadaan bahan pangan agar lebih inklusif dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dengan realisasi di lapangan (Ruhenda et al. 2020). Program MBG yang seharusnya tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan petani dan UMKM, belum sepenuhnya tercapai di Kecamatan Sompak. Oleh karena itu, diperlukan perluasan cakupan SPPG, penguatan koordinasi pelaksana, serta pembentukan sistem rantai pasok yang lebih inklusif agar program dapat memberikan manfaat yang lebih merata baik dari sisi gizi maupun ekonomi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak masih berada pada tahap awal sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Program ini baru dilaksanakan melalui satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Desa Galar dengan dukungan 44 tenaga kerja. Kehadiran SPPG tersebut menunjukkan adanya upaya awal pemerintah dalam merealisasikan program peningkatan gizi masyarakat, namun kapasitas layanan yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Sompak.

Dari aspek cakupan layanan, penerima manfaat Program MBG masih relatif terbatas. Hingga saat penelitian dilakukan, program baru menjangkau 14 sekolah dan 3 posyandu,

sementara masih terdapat 20 sekolah dan 23 posyandu yang belum memperoleh layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi program belum merata dan masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap manfaat program. Akibatnya, tujuan utama MBG untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, belum dapat diwujudkan secara menyeluruh di Kecamatan Sompak.

Dari aspek pemberdayaan ekonomi lokal, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan petani lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok Program MBG masih belum optimal. Bahan pangan yang digunakan oleh SPPG sebagian besar belum berasal langsung dari petani setempat, termasuk dari wilayah yang memiliki potensi produksi sayuran dan komoditas pangan lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa belum tersedia mekanisme yang efektif untuk menghubungkan kebutuhan program dengan kapasitas produksi masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan antara pemerintah, pengelola program, petani, serta pelaku UMKM agar Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Astawa, P., Anggreni, I. M., & Tegeh, I. M. (2019). Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe make a match berbantuan media PowerPoint terhadap hasil belajar IPA. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 3(1), 98. <https://doi.org/10.23887/jisd.v3i1.17663>
- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8549–8557. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2355>
- Badan Gizi Nasional. (2026). Pernyataan tentang kewajiban SPPG dalam mengakomodasi produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak. (2025). *Kabupaten Landak dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Landak.
- Batara, S. (2012). Urbanisasi, modernisasi dan perubahan sosial pada komunitas lokal perkotaan: Kasus Kota Baru Metro Tanjung Bunga, Makassar. *Jurnal Tata Loka*, 14(1), 13–25.
- Cahyo, A. N. (2017). Manajemen sumber daya manusia (SDM) pendidikan dalam meningkatkan daya saing SDIT Ar-Rahmah Pacitan. *Muslim Heritage*, 1(2), 263–286.
- Christiani, C. (n.d.). Permasalahan dalam kajian ini adalah: Tujuan penelitian: 102–114.
- Dominggus, H. A., & Pandor, P. (2022). Membangun societias dialogal-negosiatif dalam menangkal radikalisme agama berdasarkan perspektif filsafat relasionalitas Armada

- Riyanto. *Jisa: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 5(1), 21–39. <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i1.10316>
- Ginting, E. S. S., Darmawan, D. R., Efriani, E., & Novianti, N. (2020). Kawasan sepakat: “Modernisasi dari peri-urbanisasi” Kota Pontianak. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 2(2), 52–64. <https://doi.org/10.24036/csjar.v2i2.54>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Data referensi pendidikan: Satuan pendidikan Kecamatan Sompak*. <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/dikdas/130913/3/jf/5/s1>
- Novia, C., Saiful, S., & Utomo, D. (2021). Analisis SWOT peningkatan daya saing pada UKM keripik nangka di Kabupaten Malang. *Teknologi Pangan: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, 12(1), 61–69. <https://doi.org/10.35891/tp.v12i1.2460>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. (2024). Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://www.peraturan.go.id/id/perpres-no-83-tahun-2024>
- Puskesmas Kecamatan Sompak. (2026). *Jadwal Posyandu Puskesmas Kecamatan Sompak bulan Juni 2026*.
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan trias politika terhadap terbentuknya sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>
- Sari, P. R., Zumaroh, Murcitaningrum, S., & Putra, A. I. (2026). Program makan bergizi gratis: Skematisasi masalah mursalah dalam peningkatan perekonomian lokal Desa Bumiharjo Batanghari. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.33477/eksy.v8i1.14104>
- Silaban, S. L., Elsi, S. D., & Rizal, D. (2026). Analisis implementasi kebijakan program makan bergizi gratis di Kota Jambi menurut teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 3(1), 137–149. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1547>
- Sudarwanto, A. S., & Kharisma, D. B. (2020). Omnibus law dan izin lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 109–126. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>
- Yuwono, I., & Mirnawati, M. (2021). Strategi pembelajaran kreatif dalam pendidikan inklusi di jenjang sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2015–2020. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1108>